



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 02 ☎ Telp. (0532) 21126-23750 📠 Fax. (0532) 21001
PanokalanBun - KALIMANTAN TENGAH 74112

April 2023

Nomor : 700/ 291/IRSUS/2023/ITKAB
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : 3 berkas
Perihal : Pelaksanaan Survey Penilaian
Integritas Tahun 2023

Kepada
Yth. 1. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian
2. Sekretaris DPRD
3. Camat
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Nomor B/1349/LIT.05/10-15/03/2023 tanggal 08 Maret 2023 hal Hasil SPI 2022 dan Pelaksanaan SPI 2023, maka diminta kerja sama Saudara untuk mengisi dan mengirim Data Populasi Internal/Pegawai dan Data Populasi Eksternal/Pengguna Layanan pada Instansi Saudara dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Formulir Populasi **Internal/Pegawai**:

- a. Data populasi ini merupakan data pegawai yang paling mutakhir dari seluruh Unit Kerja di Pemerintah Daerah.
- b. Seluruh table diharapkan dapat diisi secara lengkap dengan data yang paling muktahir. Mengingat E-SPI akan dilakukan secara online sehingga penting untuk diperhatikan kelengkapan dan keterisian informasi daftar kontak seperti:
 - Nomor Handphone/WhatsApp dan alamat email sebagai data primer untuk kemudahan survey secara online.
 - Data jabatan dan masa kerja pada unit kerja sebagai dasar dalam melakukan pemilihan responden pegawai yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam SPI.
- c. Selain itu, pegawai yang berada pada unit kerja yang tidak menjadi sampling (mis, pengawas internal/Inspektorat, BLU Daerah, RSU Daerah dan Fasilitas Kesehatan, Kelurahan/Desa, Sekolah dan unit kerja non-induk lainnya) dapat dikeluarkan dari daftar sampling.
- d. Kriteria pegawai yang masuk dalam formulir data populasi adalah:
 - Seluruh ASN (PNS dan PPPK) yang bekerja minimal 1 tahun dan melaksanakan pekerjaan utama pada unit kerja.
 - Seluruh ASN (PNS dan PPPK) yang melaksanakan pekerjaan utama pada unit kerja tersebut.
 - Non-ASN (seperti honorer) yang melakukan pekerjaan utama pada unit kerja tersebut wajib dimasukkan dalam data populasi pegawai, namun mohon berikan keterangan bahwa pegawai tersebut adalah non-ASN.
- e. Kriteria Pegawai yang **tidak masuk** dalam formulir data populasi adalah:
 - Pejabat tertinggi pada unit kerja eselon 2 yang disampling (seperti Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala OPD, dll) dikarenakan sebagai mitra teknis pelaksanaan SPI di K/L/PD.
 - ASN yang melakukan fungsi dukungan umum seperti pramusaji, cleaning service ,security, driver, dst.
 - Pegawai yang berada pada unit kerja yang tidak menjadi sampling (mis. Pengawas Internal/Inspektorat, BLU Daerah, RSU Daerah, RSU Daerah dan Fasilitas Kesehatan, Kelurahan/ Desa, dan unit kerja non-induk lainnya).

f. Data disampaikan dalam format Ms. Excel sebagaimana terlampir.

2. Formulir populasi **eksternal/pengguna layanan**:

- a. Data pengguna anggaran layanan ini merupakan data seluruh pihak (individu maupun perusahaan) dalam 1 tahun terakhir (Juni 2022 s.d Mei 2023) yang menjadi pengguna layanan yang berasal dari seluruh unit kerja yang melakukan fungsi layanan publik.
- b. Pengguna layanan tidak termasuk pengguna layanan yang merupakan internal/pegawai dari instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tersebut.
- c. Jika pengguna layanan adalah perusahaan, maka mohon dapat dicantumkan data personil/direksi/pegawai dari perusahaan tersebut.
- d. Seluruh tabel diharapkan dapat diisi dengan data yang paling mutakhir, mengingat E-SPI akan dilakukan secara online sehingga penting untuk diperhatikan kelengkapan dan keterisian informasi daftar kontak seperti:
 - o Nomor Handphone/WhatsApp dan alamat email sebagai data primer untuk kemudahan survei secara online.
 - o Unit Kerja (tempat mengurus layanan publik) dan nama/jenis layanan publik yang diterima/diurus oleh pengguna layanan sebagai dasar dalam melakukan pemilihan responden pengguna layanan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam SPI.
- e. Selain itu, pengguna layanan yang berada pada unit kerja yang tidak menjadi sampling (mis.pengawas internal/Inspektur,BLU Daerah dan Fasilitas Kesehatan, Kelurahan/ Desa, Sekolah, dan unit kerja non-induk lainnya) dapat dikeluarkan dari daftar sampling. Sehingga, contoh unit kerja dan layanan yang dapat diambil pengguna layanannya adalah sebagai berikut:
 - o Penanaman Modal/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); Izin perusahaan, Izin investasi, dll.
 - o Kependudukan dan Catatan Sipil: Pencatatan KTP / KK, Catatan Perkawinan (Non-Muslim), Perpindahan Domisili, dll.
 - o Kesehatan: SIP Tenaga Kesehatan
 - o Perhubungan: Jembatan Timbang, KIR, Izin penutupan jalan, dll.
 - o Pendapatan Daerah: Pajak Hotel/Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor, dll.
 - o Pendidikan: Koordinasi Dana BOS,dll.
 - o PUPR: Binamarga: Perusahaan Kontraktor Pelaksana Proyek di Daerah, dll.
 - o Pertanian/Perikanan/Pangan/dsb: Penerima bantuan, penerima pelatihan, vendor pengadaan bibit/benih,dll.
 - o ULP/UKPBJ: Vendor pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- f. Kriteria pengguna layanan yang masuk dalam formulir data populasi:
 - o Seluruh pengguna layanan yang mengurus layanan pada 1 tahun terakhir (Juni 2022 s.d Mei 2023) pada unit kerja tersebut.
 - o Untuk unit kerja dengan pengguna layanan dalam 1 bulan lebih dari 300 orang, maka pengguna layanan yang masuk dalam daftar populasi adalah yang mengurus layanan pada 3 bulan terakhir (Maret 2023 – Mei 2023).
 - o Untuk unit kerja dengan pengguna layanan dalam 1 bulan lebih dari 1.000 orang, maka pengguna layanan yang masuk dalam daftar populasi adalah yang mengurus layanan pada 1 bulan terakhir (Maret 2023 – Mei 2023).

3. Formulir populasi **eksper/stakeholder**:

- a. Data eksper/pakar/stakeholder merupakan personil dengan kriteria yang dinilai cukup mumpuni (memiliki pengetahuan dan Informasi yang memadai) dalam menilai Pemerintah Daerah.
- b. Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Pensiunan maksimal 5 tahun terakhir (Pejabat minimal eselon II untuk K/L/Provinsi atau eselon III untuk Kabupaten/Kota)
 - Auditor BPK
 - Auditor BPKP
 - Perwakilan Ombudsman Asosiasi pengusaha (KADIN, HIPMI, APINDO) atau pengusaha yang berpengaruh
 - DPRD (Pimpinan DPRD dan ketua komisi yang membidangi pemerintahan (diutamakan Komisi A))
 - Advokat
 - Saber Pungli Kepolisian (Polres untuk Kab/Kota, Polda untuk Provinsi)
 - Saber Pungli Kejaksaan (Kejari untuk Kab/Kota, Kejati untuk Provinsi)
 - Saber Pungli Pengadilan (PN untuk Kab/Kota, PT untuk Provinsi)
 - Jurnalis/ Wartawan media lokal terbesar
 - Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ NGO antikorupsi terbesar yang bekerja sama dengan Pemda
- c. Jika eksper/ pakar/ stakeholder merupakan instansi/ lembaga/ organisasi/ asosiasi badan usaha, maka mohon dapat dicantumkan data personil/penanggung jawab/pegawai dari instansi/organisasi tersebut yang dinilai memiliki pengetahuan dan Informasi yang mumpuni/memadai terhadap pemda tersebut.
- d. Seluruh tabel diharapkan dapat diisi dengan data yang paling mutakhir, mengingat ESPI akan dilakukan secara online sehingga penting untuk diperhatikan kelengkapan dan keterisian informasi daftar kontak seperti:
- Nomor Handphone/WhatsApp dan/atau alamat email menjadi penting sebagai data primer untuk kemudahan survei secara online.
 - Kriteria eksper dan jabatan eksper sebagai dasar dalam melakukan pemilihan responden eksper yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam E-SPI.
- e. Data disampaikan dalam format Ms. Excel sebagaimana terlampir.

Seluruh Formulir Data Populasi dikirim dalam bentuk softcopy (format excel) melalui email Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat itkabkobar@gmail.com paling lambat tanggal 05 Mei 2023. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi PIC SPI Kabupaten Kotawaringin Barat an. Sdri. Sri Mulyati nomor Hp/Wa 081334481749

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Plh. Sekretaris Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat


Dr. Ir. JUNI GULTOM, S.T, MTP.
NIP. 19680609 199503 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Kotawaringin Barat
2. Deputi Pencegahan KPK RI
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat

Format pengumpulan data populasi Pegawai (Internal)						
No	Unit Kerja/ SKPD/ OPD	Nama Pegawai	Tanggal mulai bekerja di unit kerja	Jabatan	No. HP (WA) aktif	E-mail aktif
1						
2						
3						
dst						

Format pengumpulan data populasi Eksternal

Pengguna Layanan (Eksternal)						
No	Unit Kerja Tempat Mengurus Layanan Publik	Nama Layanan yang diterima	Tanggal/ Bulan/ Tahun Mengurus Layanan	Nama Pengguna Layanan	No. HP (WA)	E-mail
1						
2						
3						
dst						

Peserta Pengadaan Barang dan Jasa (tahap <i>beauty contest</i>)							
No	Unit Kerja Pengadaan	Nama Usaha Penyedia	Nama Contact Person Penyedia	Nomor Contact Person Penyedia	Alamat e-mail Contact Person Penyedia	Nama Pekerjaan	Tanggal Proses Pengadaan
1							
2							
3							
4							
dst							